

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BULUNGAN**

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bulungan 2021

Nomor Publikasi : 65020.2120
Katalog BPS : 4102004.6502

Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 65 halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan

Gambar Kulit:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan

Diterbitkan oleh:
© BPS Kabupaten Bulungan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:

Maibu Barwis Sugiharto, SST.,M.Si.

Penulis:

Ayu Pinta Gabena Siregar, SST

Gambar Kulit:

Ayu Pinta Gabena Siregar, SST

Pengolah Data:

Ayu Pinta Gabena Siregar, SST

Penyunting:

Tiara Kusuma Widianingrum SST

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kabupaten Bulungan. Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh BPS (Data Primer) dan data yang berasal dari instansi lain (Data Sekunder) terkait tema yang disajikan. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Potensi Desa (Podes), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi yang akan datang.

Tanjung Selor, Desember 2021

Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Bulungan



Maibu Barwis Sugiharto, SST, M.Si.

<https://bulungankab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Metodologi.....	4
1.4 Sistematika Penyajian.....	5
1.5 Konsep dan Definisi	6
BAB 2 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
2.1 Jumlah dan Struktur Penduduk	19
2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....	21
2.3 Rasio Ketergantungan.....	24
2.4 Fertilitas dan Keluarga Berencana.....	25
BAB 3 KESEHATAN	
3.1 Angka Kesakitan	28
3.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan.....	29
3.3 Tenaga Penolong Persalinan	31
BAB 4 PENDIDIKAN	
4.1 Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan.....	35
4.2 Tingkat Partisipasi Sekolah	38
4.3 Kualitas Layanan Pendidikan	41
BAB 5 KETENAGAKERJAAN	
5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja	44
5.2 Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan	47
5.3 Jam Kerja.....	49
BAB 6 POLA KONSUMSI	
6.1 Pengeluaran Rumah Tangga	53
6.2 Penduduk Miskin	56
BAB 7 PERUMAHAN	
7.1 Kualitas Rumah Tinggal	60
7.2 Fasilitas Rumah Tinggal	77

<https://bulungankab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020 (orang).....	19
Tabel 2.2.1	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2020 dan Luas Wilayah menurut Kecamatan	21
Tabel 2.2.2	Persebaran dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan, 2020	22
Tabel 2.3.1	Struktur Umur Penduduk dan Rasio Ketergantungan, 2020	25
Tabel 2.4.1	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas menurut Status Perkawinan, Tahun 2020	25
Tabel 3.1.1	Angka Kesakitan Kabupaten Bulungan menurut Jenis Kelamin, 2019-2020	29
Tabel 3.2.1	Persentase Penduduk yang menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Tahun 2020	30
Tabel 3.2.2	Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan Tahun 2020	31
Tabel 4.2.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Sekolah, 2020	39
Tabel 4.2.2	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020	40
Tabel 4.3.1	Jumlah Guru, Jumlah Murid, dan Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bulungan, 2020	42
Tabel 5.1.1	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bulungan Tahun 2018 – 2020	45
Tabel 5.2.1	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bulungan, Agustus 2018-2020	48
Tabel 5.3.1	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Bulungan, Agustus 2020	50
Tabel 6.1.1	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Makanan menurut Jenis Kelompok Makanan (Rp), Tahun 2020	55
Tabel 6.1.2	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Bukan Makanan menurut Jenis Kelompok Bukan Makanan (Rp), Tahun 2020	56

Tabel 6.2.1 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bulungan, 2017-2020..... 57

<https://bulungankab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 (orang)	19
Gambar 2.2.1	Persentase Persebaran Penduduk menurut Kecamatan, 2020	23
Gambar 2.4.1	Persentase perempuan berumur 15-49 tahun menurut status penggunaan alat/cara KB, 2020.....	26
Gambar 3.3.1	Persentase Ibu Melahirkan Menurut Penolong Persalinan Terakhir Tahun 2020 (persen).....	32
Gambar 4.1.1	Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin (persen), 2020	36
Gambar 4.1.2	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut karakteristik dan status pendidikan, 2020	38
Gambar 5.1.1	Diagram Ketenagakerjaan	45
Gambar 5.1.2	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, di Kabupaten Bulungan, Agustus 2018-2020	46
Gambar 5.2.1	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, di Kabupaten Bulungan, Agustus 2018-2020.....	48
Gambar 6.1.1	Persentase Pengeluaran Penduduk menurut Sub Kelompok Makanan dan Bukan Makanan, Tahun 2016 – 2020	53
Gambar 6.1.2	Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas Kelompok Pengeluaran, 2020	54
Gambar 7.1.1	Persentase rumah tangga menurut karakteristik KRT dan status kepemilikan bangunan tempat tinggal, 2020.....	60
Gambar 7.1.2	Persentase rumah tangga menurut karakteristik KRT dan fasilitas tempat buang air besar (persen), 2020.....	61
Gambar 7.1.3	Persentase rumah tangga menurut karakteristik KRT dan jenis kloset yang digunakan, 2020	61
Gambar 7.1.4	Persentase rumah tangga menurut karakteristik dan tempat pembuangan akhir tinja, 2020	63
Gambar 7.2.1	Persentase rumah tangga menurut sumber air utama untuk mandi/cuci/dll, 2020	64

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan nasional adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, berbagai program telah dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan telah mengerahkan sumber daya yang dimiliki dan melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang pendidikan dengan kebijakan gratis biaya sekolah sampai jenjang Sekolah Menengah Atas, di bidang kesehatan dengan membangun dan menempatkan tenaga kesehatan untuk bertugas di puskesmas pembantu desa yang sulit akses transportasi, serta kebijakan-kebijakan lain yang berpihak kepada masyarakat. Tentu saja diharapkan agar pembangunan yang dalam prosesnya membutuhkan dana yang tidak kecil ini dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat baik diperkotaan maupun perdesaan.

Untuk dapat menilai sampai sejauh mana pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, monitoring terhadap pencapaian pembangunan sangat diperlukan, sehingga pembangunan selanjutnya dapat lebih dioptimalkan. Untuk melakukan monitoring terhadap

pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat diperlukan indikator-indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi penduduk di Kabupaten Bulungan. Dimensi kesejahteraan rakyat yang sangat luas membuat suatu taraf kesejahteraan hanya dapat terlihat melalui aspek tertentu, oleh karena itu dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat dilihat melalui beberapa aspek yang spesifik, diantaranya adalah aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, konsumsi rumah tangga serta perumahan yang disajikan dalam bentuk indikator tunggal maupun komposit.

1.2 Tujuan

Tujuan secara umum dari penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bulungan. Sedangkan tujuan secara khususnya adalah untuk menggambarkan tingkat pertumbuhan dan persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Bulungan, bersama dengan kondisi kesehatan, pendidikan, pengeluaran rumah tangga, dan fasilitas perumahan yang dimiliki.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari kinerja pembangunan dan salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan selanjutnya.

1.3 Metodologi

Data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini adalah data primer yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan

melalui beberapa survei seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), serta beberapa survei/sensus lain sebagai pelengkap. Publikasi ini juga menggunakan beberapa data sekunder yang diperoleh dari berbagai dinas terkait.

Adapun metodologi yang digunakan dalam penyajian publikasi ini adalah dengan metode deskriptif. Dengan metode ini kondisi kesejahteraan penduduk Kabupaten Bulungan akan dianalisis dengan menggunakan tabel-tabel dan grafik-grafik yang dibangun berdasarkan data yang telah disebutkan sebelumnya.

1.4 Sistematika Penyajian

Secara sistematis publikasi ini akan disajikan dalam tujuh bagian. Masing-masing bagian akan diuraikan secara rinci sesuai dengan tema besar bahasan dalam publikasi ini. Pada bagian pertama akan disajikan fenomena yang melatarbelakangi penyusunan publikasi ini, tujuan, metodologi yang digunakan, serta konsep define dari variabel-variabel yang ditampilkan pada bagian-bagian selanjutnya. Bagian kedua akan menyajikan kondisi kependudukan di Kabupaten Bulungan, mengenai komposisinya, perkembangan maupun persebarannya, serta Keluarga Berencana. Pada bagian ketiga publikasi ini akan menampilkan kondisi kesehatan penduduk serta berbagai hal yang berhubungan dengan itu.

Pada bagian selanjutnya yakni bagian keempat akan disajikan indikator yang dapat menggambarkan kondisi pendidikan di Kabupaten Bulungan, seperti tingkat partisipasi sekolah dan kemampuan baca tulis. Pada bab kelima akan ditampilkan perihal ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Bulungan. Sedangkan pada bagian keenam akan ditampilkan mengenai

pengeluaran konsumsi penduduk, baik secara umum maupun berdasarkan kelompok makanan dan bukan makanan. Dan pada bagian terakhir akan disajikan data mengenai perumahan yang mencakup berbagai fasilitas perumahan dan kualitasnya.

1.5 Konsep dan Definisi

- **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.
- **Rumah Tangga Khusus** adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa, dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.
- **Kepala Rumah Tangga** adalah salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ ditunjuk sebagai KRT.
- **Anggota Rumah Tangga** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah. Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian

selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

- **Kawin** adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.
- **Cerai Hidup** adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku pernah hamil dianggap sebagai cerai hidup.
- **Cerai Mati** adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.
- **Anak Lahir Hidup** adalah semua anak yang waktu lahir memperlihatkan tanda-tanda kehidupan, walaupun sesaat, seperti adanya detak jantung, bernafas, menangis, dan tanda-tanda kehidupan lainnya.

- **Anak Masih Hidup** adalah semua anak yang dilahirkan hidup yang pada saat pencacahan masih hidup, baik tinggal bersama orang tuanya maupun yang tinggal terpisah.
- **Pendidikan Formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, SMA/MA/Sederajat, dan PT.
- **Pendidikan Nonformal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C), serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- **Tidak/Belum Pernah Sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
- **Tamat Sekolah adalah** telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus, maka dianggap tamat.
- **Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang

pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

Belum Tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang Sederajat tetapi tidak/ belum tamat.

SD meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan/atau Sederajat.

SMP meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) umum, Madrasah Tsanawiyah (MTs), SMP kejuruan, dan Sederajat.

SMA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan Sederajat.

Diploma/Sarjana adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pasca sarjana (master atau doctor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

- **Dapat Membaca dan Menulis** adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.
- **Angka Buta Huruf** adalah proporsi penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu.
- **Angka Partisipasi:**
Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

$$APS_{7-12} = \frac{P_{7-12} \text{ Masih Sekolah}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

P_{7-12} : Penduduk usia 7 – 12 tahun

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.

$$APM_{7-12} = \frac{P_{7-12} \text{ SD}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

$$APK_{7-12} = \frac{P_{SD}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

- **Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.
- **Keluhan Kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal, dll.
- **Sakit adalah** menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.
- **Penolong Kelahiran oleh Tenaga Kesehatan** adalah penolong kelahiran terakhir oleh dokter, bidan, dan tenaga medis.
- **Air Susu Ibu (ASI)** adalah satu-satunya makanan terbaik bagi bayi dan juga makanan alami, yang komposisinya memenuhi seluruh

kebutuhan bayi selama enam bulan. ASI mengandung zat kekebalan yang memberi perlindungan terhadap berbagai penyakit dan juga mengandung enzim yang akan membantu pencernaan. Menyusui dengan rasa kasih sayang dapat mempererat ikatan batin ibu dan bayi.

- **Mengobati Sendiri** adalah upaya anggota rumah tangga yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri (tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra).
- **Angkatan Kerja** adalah penduduk yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak berkerja, atau yang sedang menganggur.
- **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).
- **Menganggur** adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan. Mereka yang dikategorikan sebagai pengangguran adalah sedang:
 1. Mencari pekerjaan;
 2. Mempersiapkan suatu usaha;
 3. Sudah diterima bekerja namun belum memulainya, dan
 4. Mereka yang tidak mencari pekerjaan akibat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan.
- **Mencari Pekerjaan** adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang

berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

- **Mempersiapkan Suatu Usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/ pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin, dsb.
- **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/ instansi tempat seseorang bekerja.
- **Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh/karyawan.
- **Jam Kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

- **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah persentase angkatan kerja yang menganggur dan tidak sedang mempunyai pekerjaan.

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Orang yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

<https://bulungankab.bps.go.id>

BAB 2

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Penduduk merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Penduduk mempunyai dua peran sekaligus, yaitu sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk kemakmuran masyarakat yang berarti posisi penduduk dalam hal ini adalah sebagai obyek pembangunan yang menikmati hasil pembangunan tersebut. Pada sisi lain, penduduk juga dapat dipotensikan sebagai penggerak pembangunan yang berarti peran penduduk sebagai subyek pembangunan yang tidak hanya menikmati hasil tetapi juga berperan aktif dalam proses pembangunan.

Sebagai subyek pembangunan, penduduk merupakan salah satu faktor produksi (tenaga kerja). Semakin besar jumlah penduduk di suatu wilayah, semakin besar pula peluang terciptanya pembangunan pada wilayah tersebut. Secara teoritis, penambahan faktor produksi akan turut meningkatkan besarnya output. Oleh karena itu, bertambahnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu diharapkan akan diikuti dengan percepatan pembangunan.

Walaupun demikian, jumlah penduduk yang besar tidak dapat semerta-merta membawa pembangunan ke arah yang positif tanpa disertai kualitas sumber daya manusia yang baik. Kualitas sumber daya manusia tercermin dari kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup. Penilaian kualitas sumber daya manusia juga dapat dilihat melalui berbagai aspek indikator, antara lain seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

Untuk menciptakan kondisi dimana terjadi pertumbuhan penduduk yang seiring dengan peningkatan kualitas manusianya, dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi sejumlah permasalahan kependudukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, perencanaan berasal dari bawah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Salah satu alat yang diperlukan dalam perencanaan kebijakan terkait pendudukan adalah data kependudukan. Data kependudukan yang tepat sangat dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan. Selain itu, data kependudukan dapat digunakan sebagai alat monitoring untuk mengukur kebijakan yang telah dilaksanakan agar lebih terarah dan tepat sasaran.

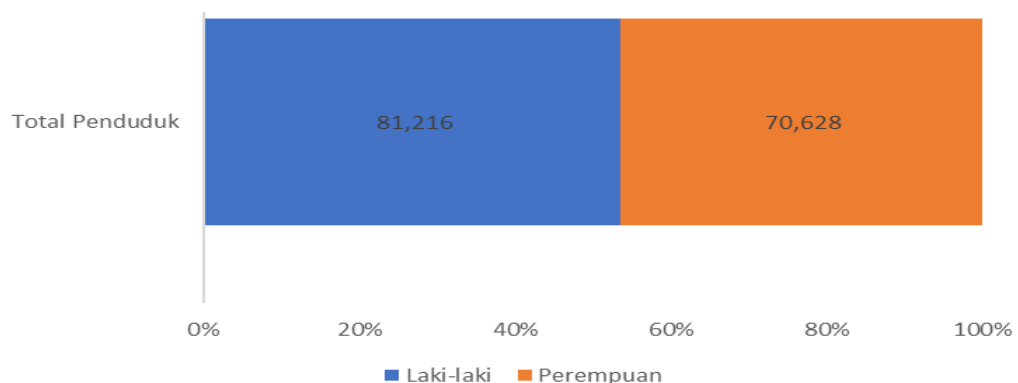
Secara nasional, jika melihat data yang tersedia, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada kisaran tahun 2030. Bonus demografi adalah keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang (Wongboonsin, dkk. 2003). Bonus demografi terjadi karena penurunan kelahiran yang dalam jangka panjang menurunkan proporsi penduduk muda sehingga investasi untuk pemenuhan kebutuhannya berkurang dan sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga (John Ross, 2004). Bonus demografi ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan untuk mendorong tercapainya kemajuan pembangunan.

2.1 Jumlah dan Struktur Penduduk

Masalah kependudukan memiliki posisi yang strategis bagi pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan sebagai penentu kebijakan maupun perencanaan program. Lebih luas lagi data kependudukan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

Jumlah penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi (perpindahan penduduk). Laju perubahan pada masing-masing faktor tersebut sangat menentukan besaran jumlah dan struktur penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang berarti. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan BPS, pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Bulungan sebanyak 151.844 jiwa, dimana jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 81.216 orang atau sekitar 53,49 persen, sementara itu jumlah penduduk perempuan adalah sebanyak 70.628 orang atau sekitar 46,51 persen.

Gambar 2.1.1
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 (orang)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Sensus Penduduk 2020)

Rasio jenis kelamin di Kabupaten Bulungan pada tahun 2020 adalah 114,9. Nilai rasio jenis kelamin ini artinya pada setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 114-115 penduduk laki-laki.

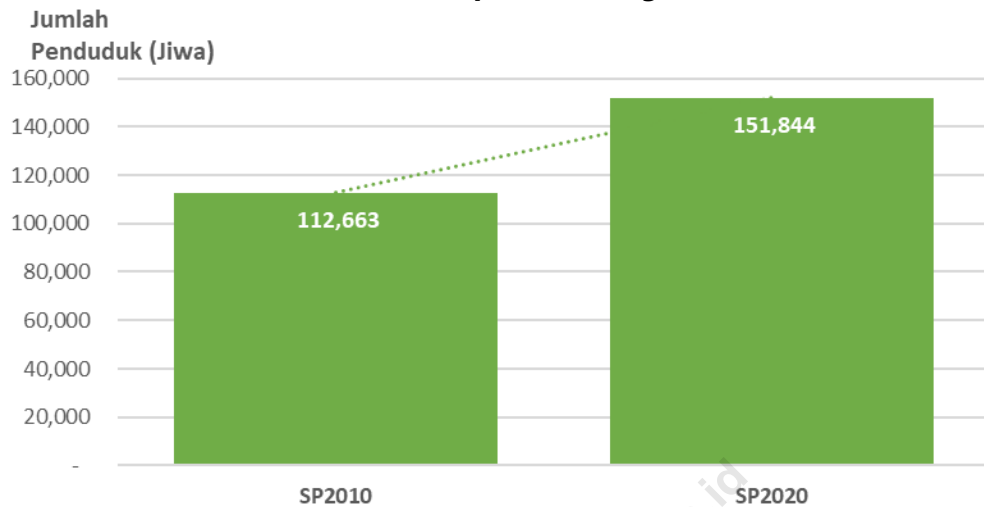
Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Bulungan tercatat sebanyak 151.844 orang. Apabila dibandingkan dengan hasil pencatatan pada Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk meningkat sebesar 39.181 orang dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bulungan sebesar 2,93 persen per tahun.

Tabel 2.1.1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020 (orang)

Kelompok Umur (1)	Jenis Kelamin		Total (4)
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	
0-4	5400	4815	10215
5-9	7733	7039	14772
10-14	7610	7122	14732
15-19	7253	6601	13854
20-24	7320	6036	13356
25-29	6845	6055	12900
30-34	6725	5951	12676
35-39	6973	6101	13074
40-44	6405	5385	11790
45-49	5365	4527	9892
50-54	4443	3490	7933
55-59	3085	2528	5613
60-64	2295	1904	4199
65-69	1504	1044	2548
70-74	789	806	1595
75-79	507	418	925
80-84	225	208	433
85-89	88	64	152
90-94	44	28	72
95+	11	9	20
Tidak Tahu	596	497	1 093
Total	81 216	70 628	151 844

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Sensus Penduduk 2020)

Gambar 2.1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan, 2010 dan 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Sensus Penduduk 2020)

2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk dapat dilihat dari distribusi penduduk menurut wilayah, sedangkan kepadatan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari rata-rata jumlah penduduk setiap kilometer persegi (km²) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah. Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang mempengaruhi kesejahteraan penduduk dan kelestarian lingkungan itu sendiri.

Tabel 2.2.1
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2020 (orang) dan Luas Wilayah menurut Kecamatan (km²)

Kecamatan (1)	Jumlah Penduduk Tahun 2020 (2)	Luas Wilayah (3)
Peso	4,400	3.142,79
Peso Hilir	4,134	1.639,71
Tanjung Palas Barat	6,416	1.064,51
Tanjung Palas	17,556	1.755,74

Tanjung Selor	56,569	677,77
Tanjung Palas Timur	18,020	1.277,81
Tanjung Palas Tengah	11,567	624,95
Tanjung Palas Utara	10,651	806,34
Sekatak	10,842	1.993,98
Bunyu	11,689	198,32
Bulungan	151,844	13.181,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Sensus Penduduk 2020) dan Bulungan Dalam Angka 2021

Persebaran penduduk di Kabupaten Bulungan secara geografis dapat dikatakan belum merata sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan yang cukup besar. Pada tabel 2.2.1 terlihat bahwa pada tahun 2020 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yaitu sebagian besar penduduk tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, sedangkan penduduk yang tinggal di kecamatan lain rata-rata hanya berkisar dibawah 10 persen kecuali kecamatan Tanjung Palas dan Tanjung Palas Timur. Persebaran penduduk di Kecamatan Tanjung Selor sebesar 37,3 persen yang berarti bahwa 37,3 persen penduduk Kabupaten Bulungan bertempat tinggal di kecamatan ini. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan karena Tanjung Selor merupakan kecamatan dengan status ibukota Provinsi Kalimantan Utara sehingga menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian.

Tabel 2.2.2
Persebaran dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan, 2020

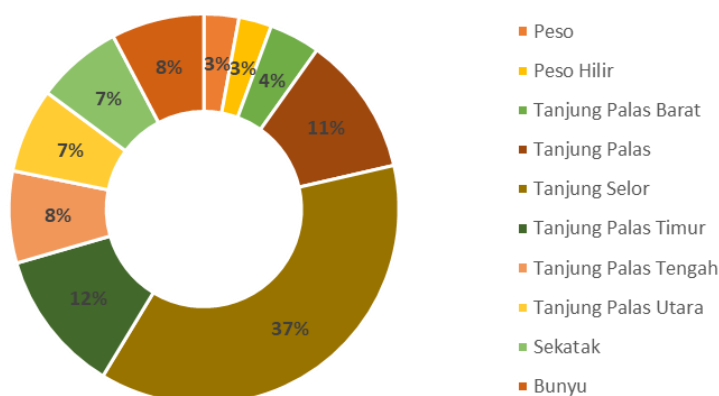
Kecamatan	Persebaran (%)	Kepadatan (jiwa/km²)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Peso	2.9	1.4
Peso Hilir	2.7	2.5
Tanjung Palas Barat	4.2	6.0
Tanjung Palas	11.6	10.0
Tanjung Selor	37.3	83.5
Tanjung Palas Timur	11.9	14.1

Tanjung Palas Tengah	7.6	18.5
Tanjung Palas Utara	7.0	13.2
Sekatak	7.1	5.4
Bunyu	7.7	58.9

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Sensus Penduduk 2020) dan Bulungan Dalam Angka 2021

Salah satu indikator pertumbuhan wilayah tercermin pula dari tingginya kepadatan penduduk di suatu wilayah. Seperti halnya persebaran penduduk, kepadatan penduduk juga terlihat timpang. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Tanjung Selor yakni 83,5 jiwa/km². Hal ini dapat diartikan bahwa pada setiap 1 km² wilayah di Tanjung Selor rata-rata terdapat 83 sampai 84 penduduk. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Peso dengan 1,28 jiwa/km² yang berarti bahwa pada setiap km² wilayah di Peso hanya dihuni 1 sampai 2 orang penduduk. Hal ini wajar karena Peso merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas dan paling jauh dari ibukota, sehingga jumlah penduduk tidak sebanyak kecamatan lainnya.

Gambar 2.2.1
Persentase Persebaran Penduduk menurut Kecamatan, 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Sensus Penduduk 2020)

2.3 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan yang dimaksud adalah angka yang menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia produktif (15-64) dengan penduduk tidak produktif seperti anak-anak dan lansia (0-14 dan 65+). Angka ini sangat dipengaruhi oleh proporsi jumlah penduduk pada penduduk usia produktif, penduduk anak-anak berusia 0-14 tahun, dan penduduk lansia yang berusia 65 tahun keatas. Pada tahun 2020, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) adalah sebesar 69,8 persen dari total populasi penduduk. Sementara itu, usia tidak produktif untuk kelompok umur 0-14 tahun sebesar 3,8 persen dan untuk kelompok umur 65 ke atas sebesar 26,3 persen. Hal ini menjelaskan bahwa kondisi Indonesia yang tergambar pula pada komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Bulungan, berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 69,8 persen penduduk masih berada di usia produktif.

Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Bulungan pada tahun 2020 adalah sebesar 43,2 yang menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak antara 43 sampai 44 orang yang belum produktif dan yang dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.3.1
Struktur Umur Penduduk dan Rasio Ketergantungan, 2020

Tahun	0-14	15-64	65+	RK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	26,4	69,8	3,8	43,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Sensus Penduduk 2020)

2.4 Fertilitas dan Keluarga Berencana

Komposisi penduduk menurut status perkawinan dapat menunjukkan kondisi fertilitas suatu wilayah. Status perkawinan dibagi menjadi empat, yaitu belum kawin, kawin, dan cerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Jika jumlah penduduk yang berstatus kawin semakin besar akan berdampak pada semakin tingginya tingkat kelahiran di suatu wilayah.

Dari tabel 2.4.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, proporsi penduduk laki-laki yang berstatus belum kawin lebih besar dibanding perempuan yaitu 39,35 persen untuk laki-laki dan 26,49 persen untuk perempuan. Sebaliknya yang berstatus kawin penduduk perempuan lebih banyak (66,04 persen) dibandingkan penduduk laki-laki (57,14 persen). Sedangkan untuk penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berstatus cerai baik cerai hidup ataupun cerai mati, proporsi perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki yakni 7,47 persen untuk perempuan dan 3,52 persen untuk laki-laki.

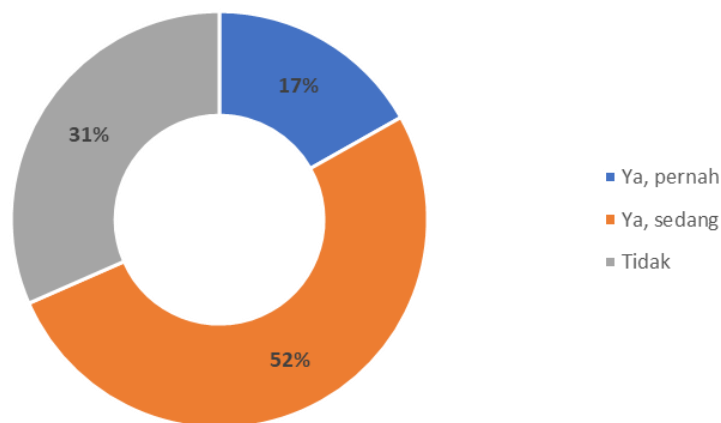
Tabel 2.4.1
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas menurut Status Perkawinan,
Tahun 2020

Status Perkawinan	2020		
	Laki-laki	Perempuan	Bulungan
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	39.35	26.49	33.38
Kawin	57.14	66.04	61.27
Cerai	3.52	7.47	5.35
Total	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Susenas 2020)

Pada tahun 2020, sebagian besar wanita pernah kawin yang berada pada usia produktif yaitu 15-49 tahun sedang menggunakan alat kontrasepsi. Persentase penduduk wanita yang menggunakan alat kontrasepsi adalah sekitar 52 persen. Sementara itu, terdapat sekitar 31 persen penduduk wanita yang tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi jenis apapun selama hidupnya. Dan yang terakhir, terdapat sekitar 17 persen penduduk wanita pernah kawin yang berada pada rentang usia 15-49 tahun yang sedang tidak menggunakan alat kontrasepsi tetapi sudah pernah menggunakan sebelumnya. Penduduk wanita tidak menggunakan alat kontrasepsi karena berbagai alasan. Padahal alat kontrasepsi sangat efektif mengontrol angka kelahiran, dan menunda kelahiran yang tidak terencana dalam rumah tangga. Berdasarkan persentase yang diperoleh tersebut, maka sosialisasi tentang pentingnya penggunaan alat kontrasepsi sebagai salah satu cara mensukseskan program Keluarga Berencana perlu ditingkatkan lagi.

Gambar 2.4.2
Persentase perempuan berumur 15-49 tahun menurut status penggunaan alat/cara KB, 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Susenas 2020)

BAB 3

KESEHATAN

Kualitas hidup manusia sangat bergantung pada tingkat kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Status kesehatan masyarakat suatu daerah dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan daerah tersebut dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya. Apabila pemenuhan kesehatan dapat terwujud maka akan lahir SDM berkualitas yang merupakan modal utama dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan dalam keadaan sehat seseorang dapat berbuat, berkarya, berkreasi, dan melakukan kegiatan produktif lainnya. SDM yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas, baik kuantitas maupun kualitasnya. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (input) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Kualitas penduduk secara fisik khususnya dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan. Selama ini berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, diantaranya dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar masyarakat berperilaku sehat, penyediaan fasilitas kesehatan serta penyediaan fasilitas air bersih. Upaya pelayanan kesehatan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar semua lapisan masyarakat dapat memperolehnya secara mudah dan murah. Dengan

upaya tersebut diharapkan derajat kesehatan yang lebih baik dapat tercapai.

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik, dalam hal ini dapat dilihat melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan.

3.1 Angka Kesakitan

Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik yang prima. Dengan fisik yang prima, segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari akan berjalan dengan lancar, baik dalam hal bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya. Hal ini dikarenakan jika tingkat kesehatan penduduk pada level yang relatif tinggi maka akan memungkinkan mereka mampu mencurahkan seluruh keterampilan, keahlian, dan kreatifitas pada kegiatan mereka. Sebaliknya, jika tingkat kesehatan penduduk berada pada kondisi yang kurang baik maka mereka cenderung kurang berperan serta dalam menciptakan tingkat efisiensi pekerjaan yang tinggi. Salah satu indikator yang menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka kesakitan. Angka kesakitan yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari.

Tabel 3.1.1. menunjukkan persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan yang dinyatakan dalam angka kesakitan pada tahun 2019 dan 2020 berdasarkan jenis kelamin. Angka ini didapat dari Survei Sosial Ekonomi Nasional pada bulan Maret setiap tahunnya. Pada tahun 2020, angka kesakitan Kabupaten Bulungan adalah 10,78 persen. Ini berarti

bahwa sebesar 10,78 persen penduduk Kabupaten Bulungan mengalami keluhan kesehatan pada sebulan yang lalu dan menyatakan menderita sakit sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Angka kesakitan ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 17,92 persen. Hal ini berarti bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pada tahun 2020 lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dari tabel 3.1.1. juga dapat diketahui bahwa penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak mengalami keluhan kesehatan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari dibanding penduduk berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan angka kesakitan penduduk perempuan selalu lebih tinggi nilainya daripada penduduk laki-laki jika dilihat pada kedua tahun tersebut.

Tabel 3.1.1
Angka Kesakitan Kabupaten Bulungan menurut Jenis Kelamin, 2019-2020

Jenis Kelamin (1)	Angka Kesakitan	
	2019 (2)	2020 (3)
Laki-Laki	17,29	9,87
Perempuan	18,64	11,80
Kabupaten Bulungan	17,92	10,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Susenas 2019 dan 2020)

3.2 Pemanfaatan Jaminan Kesehatan

Untuk mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pengobatan, sebagian masyarakat telah menggunakan jaminan kesehatan yang dimiliki. Jaminan kesehatan ini memudahkan masyarakat dalam menanggung biaya pengobatan.

Tabel 3.2.1
Persentase Penduduk yang menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Tahun 2020

Jenis Kelamin	Penduduk Berobat Jalan
(1)	(2)
Laki-Laki	64,94
Perempuan	61,77
Total	62,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Susenas 2020)

Berdasarkan hasil Susenas Maret tahun 2020 yang dilakukan BPS Kabupaten Bulungan, diketahui bahwa dari seluruh penduduk yang berobat jalan, terdapat sekitar 62,23 persen yang menggunakan jaminan kesehatan. Dimana apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, dari seluruh penduduk laki-laki yang berobat, terdapat sebanyak 64,94 persen yang menggunakan jaminan kesehatan. Sementara itu, terdapat sebanyak 61,77 persen penduduk perempuan yang menggunakan jaminan kesehatan. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa lebih dari setengah penduduk yang berobat telah menggunakan jaminan kesehatan. Dimana jaminan kesehatan yang dimaksud dapat meliputi jaminan kesehatan nasional ataupun jaminan kesehatan swasta.

Terdapat berbagai alasan mengapa seseorang tidak melakukan berobat jalan. Tabel 3.2.2 menunjukkan beberapa alasan penduduk Kabupaten Bulungan yang mengalami keluhan kesehatan tetapi tidak melakukan berobat jalan. Sebanyak 54,9 persen memilih untuk mengobati sendiri keluhan kesehatan yang mereka alami menggunakan obat tanpa resep dokter. Kemudian sebanyak 40,5 persen merasa tidak perlu melakukan berobat jalan, 2,8 persen tidak memiliki biaya transportasi, dan 1,8 persen memiliki alasan lain untuk tidak berobat jalan seperti tidak

punya biaya berobat, tidak ada sarana transportasi, waktu tunggu pelayanan lama, tidak ada yang mendampingi.

Tabel 3.2.2
Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan Tahun 2020

Alasan Utama Tidak Berobat Jalan	Persentase
(1)	(2)
Mengobati sendiri	54,9
Merasa tidak perlu	40,5
Tidak ada biaya transportasi	2,8
Lainnya	1,8
Total	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Susenas 2020)

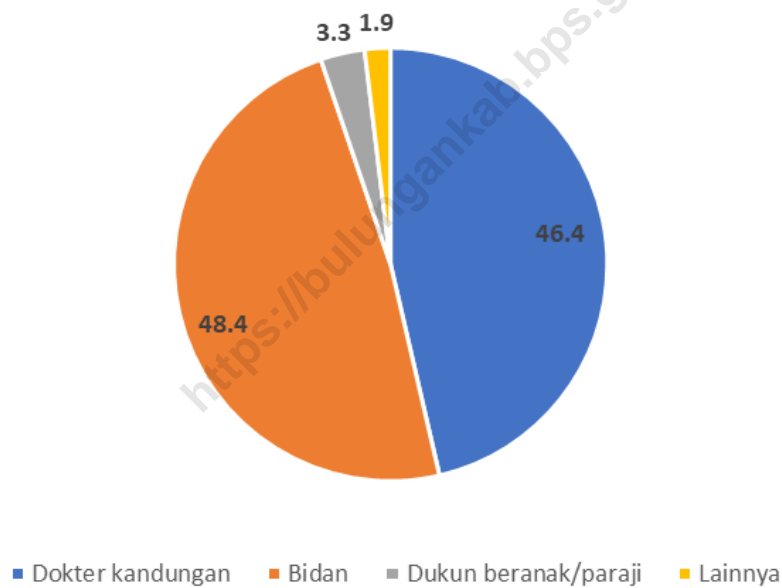
3.3 Tenaga Penolong Persalinan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, selain ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas serta sarana kesehatan, tenaga penolong persalinan juga tidak kalah penting. Hal ini berkaitan dengan upaya menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu saat melahirkan. Tenaga penolong persalinan menentukan keberhasilan persalinan dan akan berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi yang ditolong selanjutnya. Data mengenai penolong kelahiran dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesehatan, terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan secara umum.

Persalinan yang aman dapat dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dianggap lebih baik daripada yang ditolong oleh dukun atau lainnya, karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran. Walau demikian di Kabupaten Bulungan

masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun bersalin/tenaga lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi dan faktor budaya yang biasa terdapat di daerah pedesaan. Dukun sebagai penolong dalam persalinan masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, karena mengingat keterbatasan fasilitas/tenaga kesehatan di daerah pedesaan. Selain itu faktor pendidikan dan sosial ekonomi dari masyarakat juga turut memengaruhi dalam hal pemilihan penolong kelahiran bayi.

Gambar 3.3.1
Persentase Ibu Melahirkan Menurut Penolong Persalinan Terakhir Tahun 2020 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Susenas 2020)

Dari Gambar 3.3.1 terlihat bahwa penolong persalinan yang paling banyak menolong persalinan di Kabupaten Bulungan selama dua tahun terakhir adalah bidan dan dokter kandungan yakni masing-masing sekitar 48,4 persen dan 46,4 persen. Akan tetapi masih ada 3,3 pesen yang persalinannya ditolong oleh dukun bersalin. Hal ini menunjukkan pemerintah tetap harus mengedukasi penduduk terutama penduduk

perempuan mengenai pentingnya pemilihan penolong persalinan yang baik untuk keselamatan ibu dan bayi. Selain itu terdapat penolong persalinan lainnya sebanyak sekitar 1,9 persen.

Dari Gambar 3.3.1 pula dapat disimpulkan bahwa penduduk sudah mulai menyadari pentingnya tenaga kesehatan dalam proses persalinan yang sesuai dengan ilmu kesehatan yang mana akan berpengaruh pada kondisi kesehatan ibu dan bayi yang ditolong selanjutnya. Hal tersebut juga menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam bidang kesehatan yaitu menyediakan tenaga kesehatan yang cukup. Pada tahun 2020, terdapat 71 dokter dan 793 perawat/bidan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bulungan (Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan). Sedikitnya proporsi jumlah ibu melahirkan yang dibantu dukun beranak atau paraji menunjukkan adanya kemajuan pelayanan kesehatan dalam hal persalinan.

BAB 4

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kualitas manusia. Semakin tinggi pendidikan, semakin baik kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bermoral dan berkualitas sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan pembangunan bangsa. Selain itu, pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia yang terampil dan produktif sehingga pada gilirannya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari hasil pendidikan yang telah atau sedang dicapai oleh penduduk. Pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun telah meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan diantaranya mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Program pendidikan yang begitu digadang-gadangkan salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP). PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Hal ini dilakukan untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar

kembali melanjutkan pendidikan. Selain itu, program dana BOS juga masih terus berjalan. Di Provinsi Kalimantan Utara sendiri telah dicanangkan program Kaltara Cerdas yang memberikan beasiswa kepada sejumlah peserta terpilih.

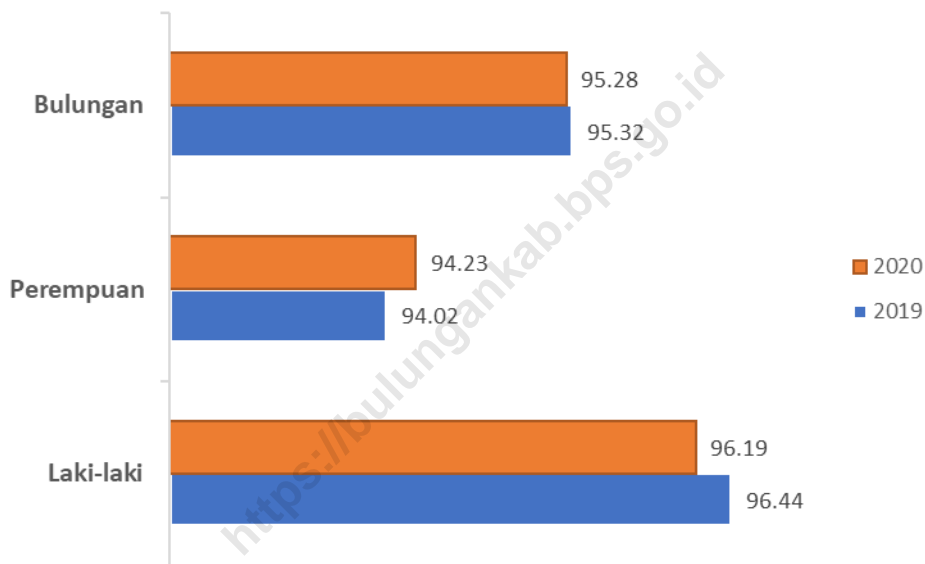
Kondisi pembangunan pendidikan dapat diketahui melalui beberapa indikator pendidikan. Indikator pendidikan dibagi menjadi tiga macam yaitu indikator input, indikator proses, dan indikator output. Indikator input merupakan informasi atau keterangan dasar dan penunjang yang diperlukan dalam perencanaan program pendidikan. Salah satu indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator input adalah rasio murid guru. Indikator proses merupakan keadaan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan yang diimplementasikan terjadi di masyarakat. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator proses antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator output merupakan hasil-hasil yang dicapai oleh masyarakat setelah melalui proses pendidikan. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator output antara lain tingkat pendidikan yang ditamatkan.

4.1 Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan

Secara makro, ukuran yang mendasar dari tingkat pendidikan adalah tingkat melek huruf. UNESCO menyatakan bahwa melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Sementara itu, Angka Melek Huruf (AMH) yang dirilis BPS merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. AMH dapat

digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan dengan kemampuan baca tulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan.

Gambar 4.1.1.
Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin (persen), 2020



Sumber: BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2020

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020, terlihat bahwa angka melek huruf Kabupaten Bulungan sebesar 95,28 persen yang berarti mayoritas penduduk di Kabupaten Bulungan sudah dapat membaca dan menulis huruf latin. Angka ini sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 95,32 persen. Walaupun demikian, angka melek huruf untuk penduduk perempuan masih tertinggal jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Angka melek huruf untuk perempuan pada tahun 2020 sebesar 94,23 persen sedangkan

angka melek huruf untuk laki-laki mencapai 96,19 persen. Ini berarti bahwa lebih lima persen penduduk perempuan berusia 15 tahun keatas di Kabupaten Bulungan masih mengalami buta huruf. Hal ini perlu diwaspadai karena perempuan yang buta huruf dikhawatirkan akan membawa efek negatif pada keturunan mereka karena kurangnya pengetahuan sang ibu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anaknya kelak.

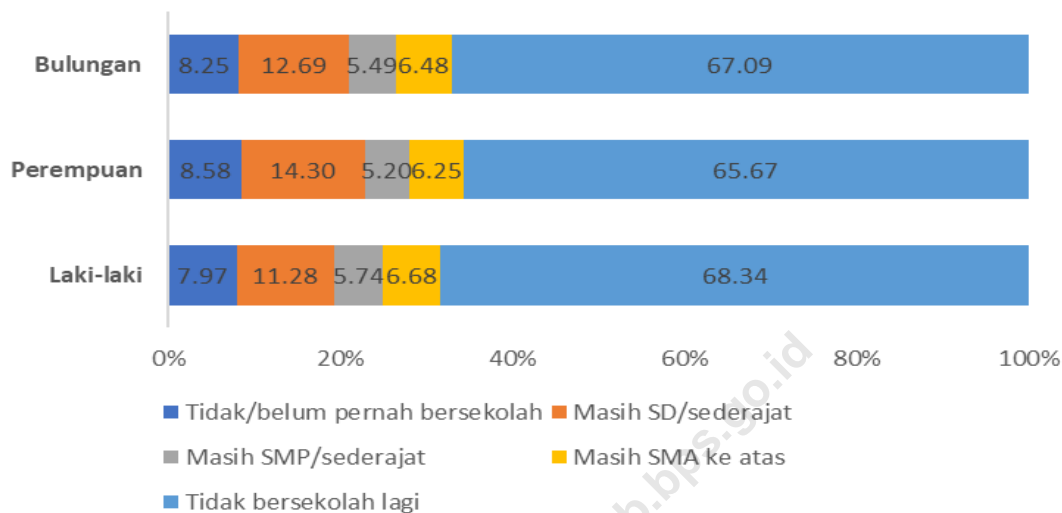
Tingkat kualitas pendidikan, selain ditinjau dari angka melek huruf juga dapat dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk. Indikator ini dipergunakan sebagai salah satu ukuran dari tingkat kemampuan sumber daya manusia. Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan, karena kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat memberi gambaran tentang jenjang pendidikan tertinggi yang dapat ditamatkan dan keadaan kualitas manusianya.

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah persentase jumlah penduduk, baik yang tidak/belum sekolah, masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi menurut ijasah/STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) yang dimiliki. Dengan diketahuinya jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Bulungan yang berusia 5 tahun ke atas sebanyak 91,75 persen pernah bersekolah, sedangkan sebanyak 8,25 persen tidak pernah bersekolah sama sekali. Hal ini berarti bahwa masih cukup banyak penduduk Kabupaten Bulungan yang tidak

memiliki pendidikan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan dengan kualifikasi yang lebih baik.

Gambar 4.1.2
Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut karakteristik dan status pendidikan, 2020



Sumber: BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2020

Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, proporsi penduduk perempuan usia 5 tahun keatas yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD jauh lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2020, sebanyak 14,30 persen penduduk perempuan berusia 5 tahun keatas di Kabupaten Bulungan masih menempuh Pendidikan SD/ sederajat. Hal ini mendukung data sebelumnya yang menyatakan bahwa proporsi penduduk perempuan yang belum bisa membaca dan menulis lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.

4.2 Tingkat Partisipasi Sekolah

Beberapa indikator lain untuk mengukur keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan pendidikan antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS merupakan indikator yang mengukur pemerataan akses

terhadap pendidikan. Semakin tinggi nilai APS menunjukkan semakin banyak penduduk yang dapat menikmati sarana pendidikan.

Tabel 4.2.1
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Sekolah, 2020

Kelompok Umur Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS)
(1)	(2)
7-12 tahun	99.21
13-15 tahun	98.58
16-18 tahun	55.98

Sumber: BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2020

Pada tahun 2020, APS untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,21 persen yang berarti bahwa dari setiap 100 anak usia 7-12 tahun, terdapat sekitar satu anak yang tidak/belum pernah bersekolah atau tidak sekolah lagi (*drop out*). APS untuk kelompok umur 13-15 tahun sebesar 98,58 persen dan untuk kelompok umur 16-18 tahun sebesar 55,98 persen. Dari ketiga kelompok umur tersebut, partisipasi sekolah tertinggi berada pada kelompok umur 7-12 tahun. Sedangkan, semakin meningkatnya usia, angka APS semakin menurun.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk

kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 4.2.2
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020

Jenjang Pendidikan	APM	APK
(1)	(2)	(3)
SD/ sederajat	86.66	98.76
SMP/ sederajat	77.93	114.05
SMA/ sederajat	44.87	68.29

Sumber: BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2020

Nilai APM pada tingkat pendidikan SD/MI tahun 2020 sebesar 86,66 persen yang berarti bahwa persentase penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD/MI sebanyak 86,66 persen. Sedangkan, APK pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 98,76 yang berarti bahwa selisih antara nilai APK dan APM ini menunjukkan bahwa terdapat penduduk yang sedang bersekolah SD/MI namun usianya kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Nilai APM dan APK terendah terdapat pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA yakni sebesar 44,87 persen dan 68,29 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa hanya 44,87 persen penduduk berusia 16-18 tahun yang sedang bersekolah SMA/SMK/MA.

Jika dicermati kembali, baik APM maupun APK, menunjukkan adanya kecenderungan penurunan setiap jenjang sekolah yang lebih tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyusun

kebijakan terkait akses pendidikan menengah dan tinggi yang capaiannya belum setinggi pendidikan dasar.

4.3 Kualitas Layanan Pendidikan

Program peningkatan kualitas pendidikan juga perlu didukung dari kualitas layanan pendidikan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas layanan pendidikan adalah rasio murid guru. Rasio murid-guru dihitung dengan membandingkan jumlah murid dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru pada daerah tertentu. Semakin sedikit angka rasio ini maka diharapkan pembangunan pendidikan akan semakin membaik karena dengan sedikitnya murid yang harus ditangani oleh seorang guru diharapkan guru tersebut dapat lebih memperhatikan murid yang menjadi tanggung jawabnya.

Akan tetapi, harus tetap berhati-hati dalam menginterpretasikan angka rasio murid guru ini dengan memperhatikan data pendukung yang lain seperti jumlah murid, jumlah guru, jumlah sekolah, dan lain sebagainya karena bisa saja angka rasio murid guru ini kecil dikarenakan memang jumlah partisipasi penduduk untuk sekolah juga kecil.

Rasio murid guru pada tahun ajaran 2019/2020 berada pada kisaran 12-14 untuk jenjang pendidikan setingkat SD hingga SMA sederajat. Rasio murid guru paling kecil berada pada tingkat SMP/sederajat sebesar 12,27 yang berarti setiap satu orang guru harus menanggung 12 hingga 13 murid. Semakin kecil rasio murid guru akan semakin mudah pula pengawasan yang dilakukan guru terhadap murid tersebut sehingga kualitas pengajaran cenderung semakin baik. Sebaliknya, rasio murid guru terbesar berada pada tingkat SD/sederajat yaitu 13,50 yang berarti bahwa setiap satu orang guru SD/sederajat harus menanggung sekitar 13-14

muridnya. Semakin banyak murid yang ditanggung maka akan semakin berat pula tugas guru untuk memperhatikan semua muridnya.

Tabel 4.3.1
Jumlah Guru, Jumlah Murid, dan Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bulungan, 2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Murid-Guru
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
SD/ sederajat	1421	19188	13,50
SMP/ sederajat	743	9117	12,27
SMA/ sederajat	566	6822	12,05

Sumber: Bulungan Dalam Angka 2021

BAB 5

KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Manusia dalam hal ini tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di berbagai bidang karena di dalam proses produksi barang dan jasa, manusia merupakan faktor yang paling penting dibandingkan dengan faktor-faktor produksi yang lain yaitu sebagai tenaga kerja yang dapat menjalankan dan menggunakan faktor produksi lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Jumlah tenaga kerja yang tepat serta kualitas yang baik dapat meningkatkan jumlah produksi. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka utamanya yang telah memasuki usia kerja diharapkan terlibat aktif di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian.

Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Semakin besar kesempatan kerja yang dapat diraih oleh penduduk dalam suatu wilayah, semakin tinggi pula standar hidup penduduk dalam wilayah tersebut. Peningkatan dalam jumlah angkatan kerja, bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembangunan.

Isu jendela kesempatan atau window of opportunity saat memasuki fase bonus demografi tidak akan banyak bermanfaat bagi percepatan pembangunan apabila lapangan pekerjaan yang ada tidak mampu menyerap ledakan angkatan kerja. Oleh karena itu, pengamatan kondisi ketenagakerjaan dari waktu ke waktu penting dilakukan untuk dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan ketenagakerjaan di masa yang akan datang.

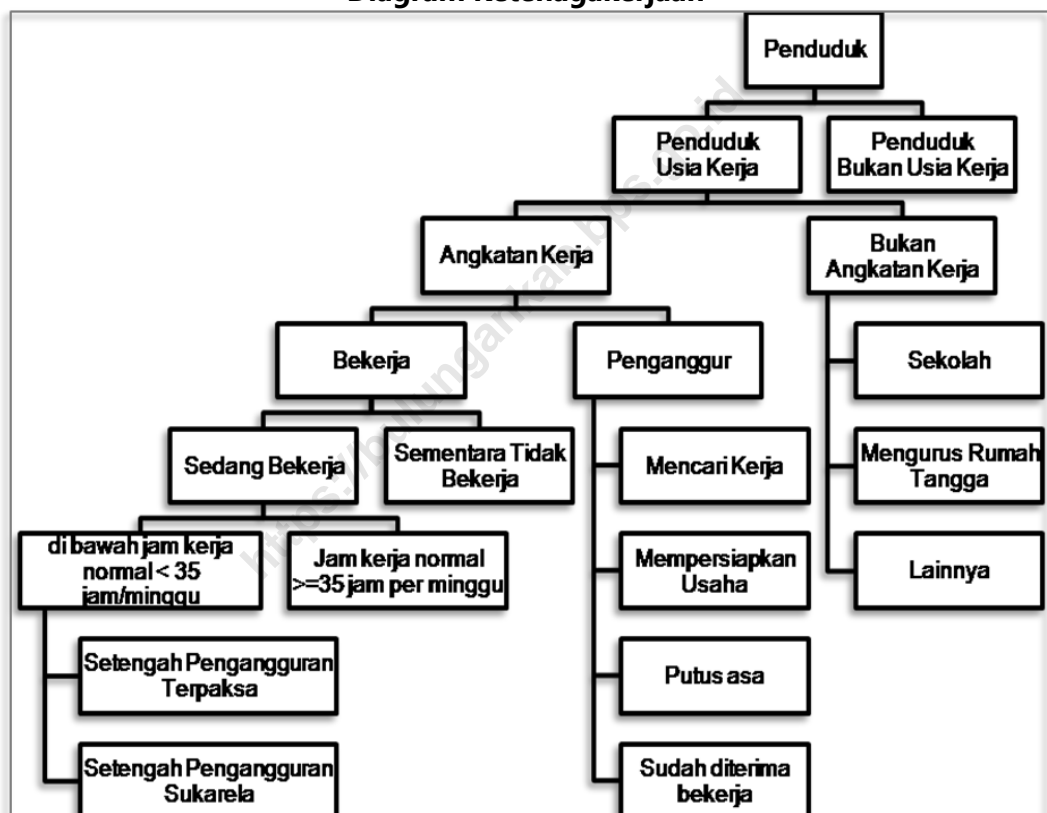
5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja

Menurut konsep BPS bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit adalah 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Tenaga kerja didefinisikan sebagai seseorang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dan merupakan penggerak perekonomian negara. Salah satu agenda pembangunan adalah menciptakan lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja. Tingkat kesempatan kerja yang luas akan meningkatkan standar hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan dan memperkecil kemungkinan terjadinya tindak kriminal yang disebabkan oleh tingkat pengangguran yang tinggi.

Berdasarkan diagram pada Gambar 5.1.1, penduduk terbagi menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan usia kerja adalah penduduk yang berumur 0–14 tahun. Penduduk usia kerja dibedakan lagi menjadi

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan mereka yang sedang menganggur. Sedangkan mereka yang bukan angkatan kerja adalah yang sedang bersekolah, hanya mengurus rumah tangga, dan lainnya, misalkan orang yang sedang sakit sehingga tidak mampu bekerja, atau yang merasa sudah berkecukupan.

Gambar 5.1.1.
Diagram Ketenagakerjaan



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK Kabupaten Bulungan Tahun 2020 sebesar 67,38

persen yang berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia 15 tahun keatas hanya sekitar 67-68 orang yang dapat bekerja sedangkan sisanya masuk kedalam kategori bersekolah ataupun mengurus rumah tangga. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2019.

Tabel 5.1.1
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bulungan Tahun 2018 – 2020

Indikator Ketenagakerjaan	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,58	66,21	67,38
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,86	4,39	4,45

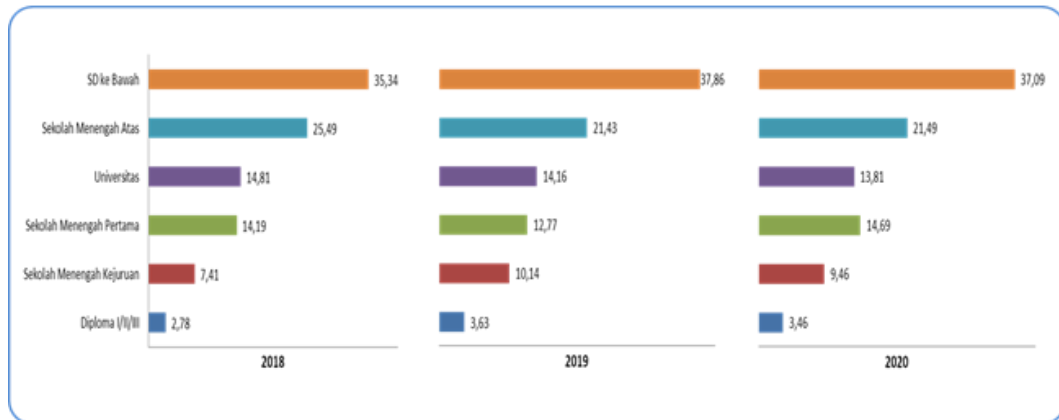
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Sakernas 2018, 2019 dan 2020)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2020, nilai TPT Kabupaten Bulungan adalah 4,45 persen, meningkat dibandingkan tahun 2019. Nilai TPT memberikan gambaran seberapa banyak angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja. Nilai TPT yang meningkat dapat diartikan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Bulungan meningkat.

Selain itu, dapat dianalisis pula terkait sebaran latar belakang Pendidikan dari penduduk yang bekerja. Pada gambar di bawah, dapat terlihat bahwa mayoritas penduduk bekerja yang terserap pada lapangan pekerjaan yang ada adalah berlatar belakang sekolah dasar ke bawah. Pada tahun 2020, terdapat sekitar 37,08 persen penduduk berlatar belakang Pendidikan tertinggi sekolah dasar yang bekerja, 21,49 persen SMA, 13,81 persen universitas, 14,69 persen SMP, 9,46 persen SMK, dan 3,46 persen berpendidikan tertinggi diploma.

Gambar 5.1.2

Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, di Kabupaten Bulungan, Agustus 2018-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Sakernas 2020 dengan penimbang hasil proyeksi SUPAS)

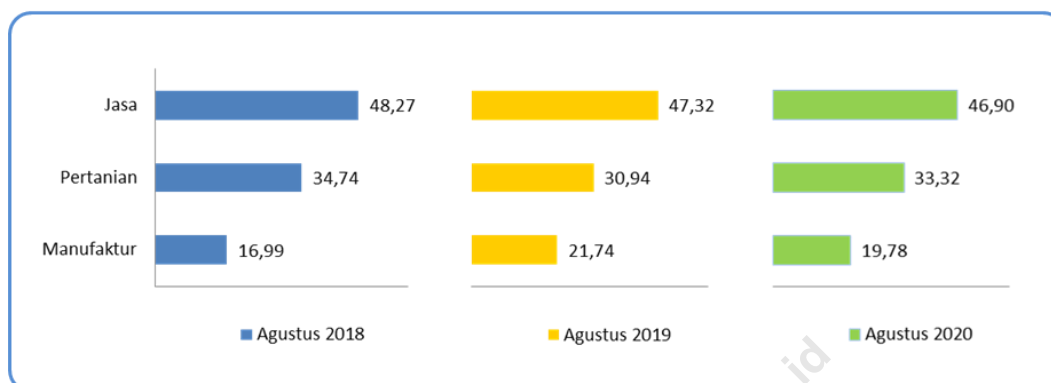
5.2 Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan

Proporsi pekerja menurut lapangan usaha/pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Lapangan usaha/bidang kerja adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat penduduk bekerja. Banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam suatu sektor perekonomian dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian terhadap angkatan kerja.

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha perkerjaan utama digunakan sebagai salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Jika lapangan usaha dikelompokkan dalam tiga sektor besar yaitu sektor pertanian, sektor manufaktur (pertambangan, industri, listrik, dan bangunan), dan sektor jasa (perdagangan, angkutan, keuangan, dan jasa), maka sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Kabupaten Bulungan tahun 2020 adalah sektor jasa, yaitu sebesar 46,90 persen, kemudian disusul oleh

sektor pertanian sebesar 33,32 persen dan sektor manufaktur sebesar 19,78 persen.

Gambar 5.2.1
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, di Kabupaten Bulungan, Agustus 2018-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Sakernas 2020 dengan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015)

Sementara itu, untuk melihat kedudukan pekerja dapat dilihat dari status pekerjaannya. Status pekerjaan dibagi menjadi tujuh kategori seperti terlihat dalam Tabel 5.2.1 pekerja keluarga sering diasosiasikan sebagai pekerja pada sektor informal dengan ciri-ciri jumlah jam kerja dan produktifitasnya yang rendah. Sementara itu pekerja dengan status buruh diasosiasikan sebagai pekerja sektor formal.

Tabel 5.2.1
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bulungan, Agustus 2018-2020

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2018		Agustus 2019		Agustus 2020	
	orang	(%)	orang	(%)	orang	(%)
Berusaha sendiri	17 281	27,47	13 601	22,04	15 662	24,70
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak	5 166	8,21	5 208	8,44	7 358	11,60
Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar	1 462	2,32	1 372	2,22	1 671	2,64
Buruh/karyawan/pegawai	30 702	48,80	31 527	51,10	28 788	45,40
Pekerja bebas di pertanian	1 155	1,84	557	0,90	694	1,09
Pekerja bebas di nonpertanian	1 302	2,07	2 642	4,28	1 744	2,75

Pekerja keluarga/tidak dibayar	5 843	9,29	6 795	11,01	7 489	11,81
Jumlah	62 911	100,00	61 702	100,00	63 406	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Sakernas 2020 dengan penimbang hasil proyeksi Supas 2015)

Pekerja di Kabupaten Bulungan bila dilihat dari status pekerjaannya, maka ada dua status yang banyak menyerap tenaga kerja yaitu buruh/karyawan/pegawai dan berusaha sendiri. Status pekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai tahun 2020 mencapai 45,50 persen atau bisa dikatakan bahwa lebih dari setengah penduduk yang bekerja di Kabupaten Bulungan berstatus buruh/karyawan/pegawai. Kemudian sekitar 24,70 persen penduduk menjalankan usaha milik sendiri dan tidak menggunakan karyawan. Status pekerjaan utama yang paling sedikit menyerap angkatan kerja adalah pekerja bebas di pertanian yang hanya mampu menyerap 1,09 persen dari seluruh angkatan kerja. Semakin kecil proporsi penduduk yang berstatus pekerja bebas berarti semakin baik pula kualitas pekerjaan yang dimiliki oleh angkatan kerja di Kabupaten Bulungan. Dengan kata lain, semakin sedikit proporsi angkatan kerja yang berstatus pekerja bebas maka semakin besar pula angkatan kerja yang memiliki pekerjaan yang tetap.

5.3 Pandemi Covid-19 dan Ketenagakerjaan di Indonesia

Pandemi Covid-19 telah banyak memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perekonomian dan dunia kerja. Ekonomi telah melambat karena Covid-19. Situasi ini telah mengakibatkan kesulitan berbagai sektor usaha. Hal ini secara tidak langsung juga memengaruhi angkatan kerja di Bulungan. Mulai dari semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan, sampai dengan adanya

pemutusan hubungan kerja pada beberapa usaha karena perusahaan tidak dapat beroperasi sebagaimana di masa normal sebelum pandemi.

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu a) Penganggur; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 pada mereka yang berhenti bekerja.

Tabel 5.3.1
Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Bulungan,
Agustus 2020

Komponen	Jumlah (orang)
(1)	(2)
Pengangguran Karena Covid-19	344
Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19	148
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	991
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	8 882
Total	10 365
Penduduk Usia Kerja (PUK)	98 485
Persentase terhadap PUK	10,52

Keterangan:

1. Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015
2. Pengangguran karena Covid-19 adalah penganggur yang pernah berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020
3. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020
4. Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19 adalah penduduk bekerja namun karena Covid-19 menjadi sementara tidak bekerja

Pada Tabel 5.3.1 dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Bulungan adalah sebanyak 10.365 orang, terdiri dari 344 orang pengangguran karena Covid-19, 148 orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19, 991 orang sementara tidak

bekerja karena Covid-19, dan 8.882 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Diketahui pula, bahwa proporsi penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dibandingkan dengan seluruh penduduk usia kerja adalah sebesar 10,52 persen. Hal ini menjelaskan bahwa cukup banyak penduduk yang terdampak pandemi ini.

<https://bulungankab.bps.go.id>

BAB 6

POLA KONSUMSI

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Pola pengeluaran rumah tangga menurut jenis pengeluaran dapat digunakan untuk melihat perubahan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Secara umum konsumsi/pengeluaran rumah tangga terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan kedua jenis pengeluaran tersebut, dapat dilihat bagaimana pola konsumsi masyarakat. Tingkat kebutuhan/permintaan (demand) terhadap kedua kelompok pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas akan mendahulukan pemenuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan.

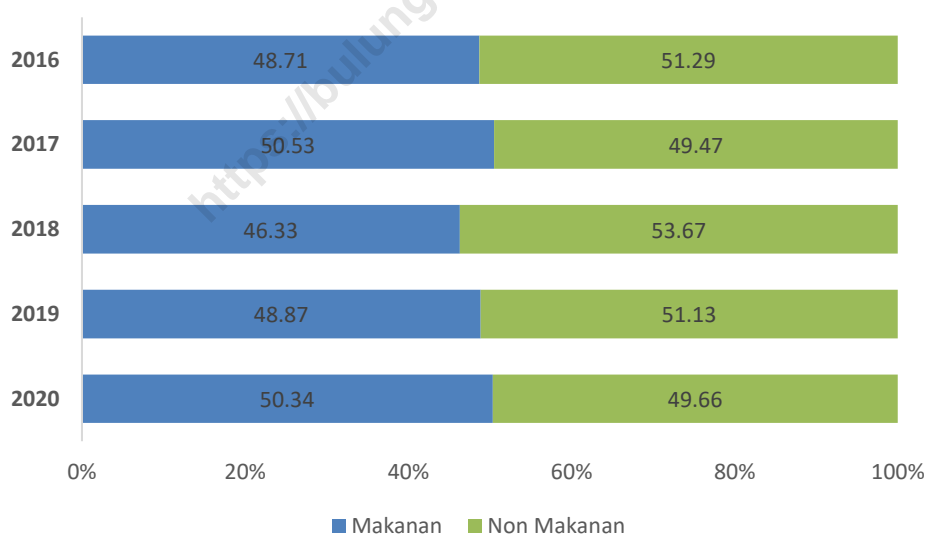
Di negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga. Di negara-negara maju, pengeluaran bukan makanan merupakan bagian yang terbesar dari pengeluaran rumah tangga karena pengeluaran makanan bukan lagi dianggap sebagai kebutuhan yang utama.

Pengeluaran primer sudah bergeser kepada pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, rekreasi dan sebagainya.

6.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberi gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Terjadinya perubahan pengeluaran atau pergeseran proporsi pengeluaran untuk makanan dapat menunjukkan ada atau tidaknya peningkatan taraf kehidupan rumah tangga. Semakin besar konsumsi/pengeluaran rumah tangga terutama porsi pengeluaran untuk bukan makanan, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan akan semakin baik

Gambar 6.1.1
Persentase Pengeluaran Penduduk menurut Sub Kelompok Makanan dan Bukan Makanan, Tahun 2016 – 2020

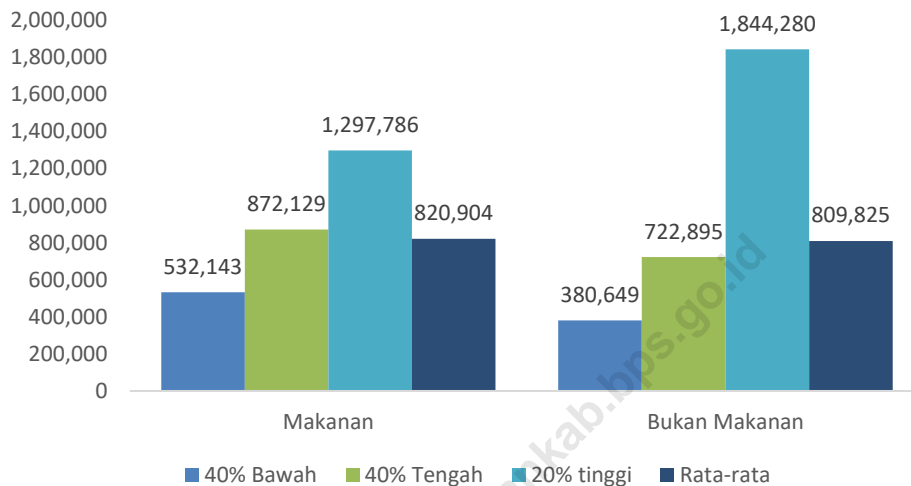


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Susenas 2020)

Gambar 6.1.1 menunjukkan persentase pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut jenis pengeluarannya. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Bulungan sebulan untuk makanan pada tahun 2020 sebesar 50,34 persen dan 49,66 persen untuk bukan makanan.

Hal ini berarti bahwa lebih dari setengah pengeluaran penduduk Kabupaten Bulungan digunakan untuk pembayaran fasilitas perumahan, barang tahan lama, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan sebagainya.

Gambar 6.1.2
Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas Kelompok Pengeluaran, 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Susenas 2020)

Pada Grafik 6.1.2 menunjukkan bahwa 20 persen kelompok pengeluaran teratas mengeluarkan rata-rata sekitar 1.297.786 rupiah per bulan untuk pengeluaran makanan dan sekitar 1.844.280 rupiah per bulan untuk pengeluaran konsumsi non makanan. Sedangkan untuk kelompok 40 persen pengeluaran terbawah menghabiskan rata-rata sekitar 532.143 rupiah per bulan untuk konsumsi makanan dan sekitar 380.649 rupiah per bulan untuk konsumsi non makanan.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk konsumsi makanan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1.1. Rata-rata total pengeluaran per kapita untuk makanan di Kabupaten Bulungan adalah sebesar Rp 820.904. Secara umum pola konsumsi makanan pada tahun 2020 paling besar

untuk pengeluaran makanan dan minuman jadi yaitu mencapai Rp. 242.226 dan paling rendah adalah umbi-umbian yaitu sekitar Rp. 7.244.

Tabel 6.1.1
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Makanan menurut Jenis Kelompok Makanan (Rp), Tahun 2020

Jenis Kelompok Makanan	Rata-Rata Pengeluaran
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Padi-padian	85.847
Umbi-umbian	7.244
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	90.494
Daging	38.645
Telur dan susu	53.708
Sayur-sayuran	68.013
Kacang-kacangan	14.551
Buah-buahan	43.038
Minyak dan Kelapa	16.379
Bahan Minuman	27.405
Bumbu-bumbuan	19.384
Bahan Makanan Lainnya	16.971
Makanan dan minuman jadi	242.226
Rokok dan Tembakau	96.999
Total Pengeluaran Makanan	820.904

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Susenas 2020)

Sementara itu rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk non makanan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1.2. Biaya untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga merupakan pengeluaran yang paling besar yaitu Rp. 442.384. Sedangkan pengeluaran paling rendah pada kelompok bukan makanan digunakan untuk keperluan pesta dan upacara yang hanya Rp 23.363 per kapita per bulan. Untuk keseluruhan

bukan makanan rata-rata pengeluaran per kapita adalah Rp. 809.825. Sehingga rata-rata pengeluaran per kapita untuk keseluruhan baik makanan dan bukan makanan adalah Rp. 1.630.729,-.

Tabel 6.1.2
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Bukan Makanan menurut Jenis Kelompok Bukan Makanan (Rp), Tahun 2020

Jenis Kelompok Bukan Makanan	2020
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	442.384
Aneka barang dan jasa	189.558
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	41.969
Barang tahan lama	62.701
Pajak, pungutan, dan asuransi	49.849
Keperluan pesta dan upacara	23.363
Total Pengeluaran Bukan Makanan	809.825

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Susenas 2020)

6.2 Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan kompleks yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang harus dihadapi oleh sebagian negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak sesuai dengan standar tertentu yang digunakan sehingga dikategorikan miskin. Tingkat kemiskinan secara umum merupakan indikasi dari perekonomian yang lemah di suatu wilayah. Oleh karena itu, kemajuan dan keberhasilan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi diantaranya akan tercermin dari keberhasilan program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Standar yang digunakan untuk menentukan apakah seorang penduduk termasuk sebagai penduduk miskin atau bukan adalah garis kemiskinan. BPS menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 6.2.1
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bulungan, 2017-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	398.397	13,40	9,93
2018	413.294	13,03	9,44
2019	448.548	12,40	8,78
2020	472.569	13,08	9,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Susenas 2017 - 2020)

Berdasarkan tabel 6.2.1, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulungan selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020, jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan atau yang lebih dikenal dengan penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi skitar 13,08 ribu penduduk miskin (kondisi Maret 2020) atau sebesar 9,06 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Bulungan. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh adanya pandemic Covid-19 yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Selain itu perekonomian juga melambat dan banyak penduduk yang mengalami penurunan penghasilan sehingga ikut memengaruhi pengeluaran masyarakat.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Selama 2017– 2020, garis kemiskinan seluruh Kabupaten/kota di Kalimantan Utara mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, tercatat garis kemiskinan Kabupaten Bulungan sebesar Rp 398.397,00/kapita/bulan dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 18,62 persen menjadi Rp 472.569/kapita/bulan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Semakin jauh dari angka nol, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) semakin melebar.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bulungan pada 2020 adalah sebesar 1,32. Indeks kedalaman kemiskinan atau Poverty Gap Index merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Sementara itu, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) atau Poverty Severity Index adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Jika nilai P2 semakin tinggi, artinya tingkat kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin besar. Nilai P2 akan selalu kurang atau sama dengan P1. Pada tahun 2020, nilai P2 di Kabupaten Bulungan adalah sebesar 0,28.

BAB 7

PERUMAHAN

Manusia dan alam lingkungannya baik lingkungan fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yang alamiah dan yang buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, maka manusia berusaha membuat tempat perlindungan yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. Dengan sifatnya sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga satu persatu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman rumah penduduk.

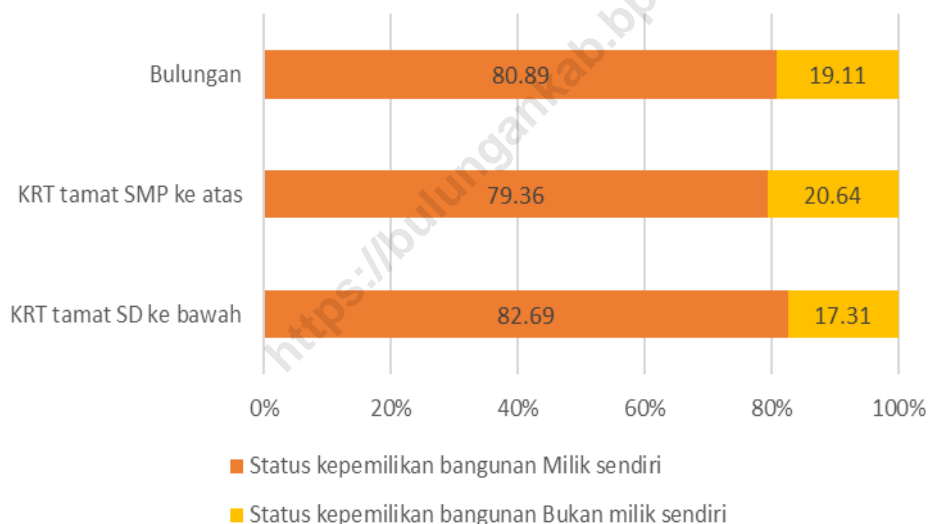
Selain kebutuhan sandang dan pangan, rumah juga merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Pada saat ini keberadaan rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan simbol status bahkan juga menunjukkan identitas pemiliknya.

Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, dimana kualitas tersebut ditentukan oleh fisik rumah tersebut yang dapat terlihat dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut diantaranya dapat terlihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, dan fasilitas tempat buang air besar. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

7.1 Kualitas Rumah Tinggal

Peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas masyarakat diwujudkan dengan pembangunan nasional di segala bidang secara berimbang. Dalam bidang perumahan, pembangunan tidak hanya menyangkut segi kuantitatif, melainkan juga segi kualitatif yang memungkinkan terselenggaranya perumahan sesuai dengan hakikat dan fungsinya. Kondisi perumahan dan lingkungan mencerminkan kondisi penduduk yang tinggal di perumahan dan lingkungan tersebut.

Gambar 7.1.1
Persentase rumah tangga menurut karakteristik KRT dan status kepemilikan bangunan tempat tinggal, 2020

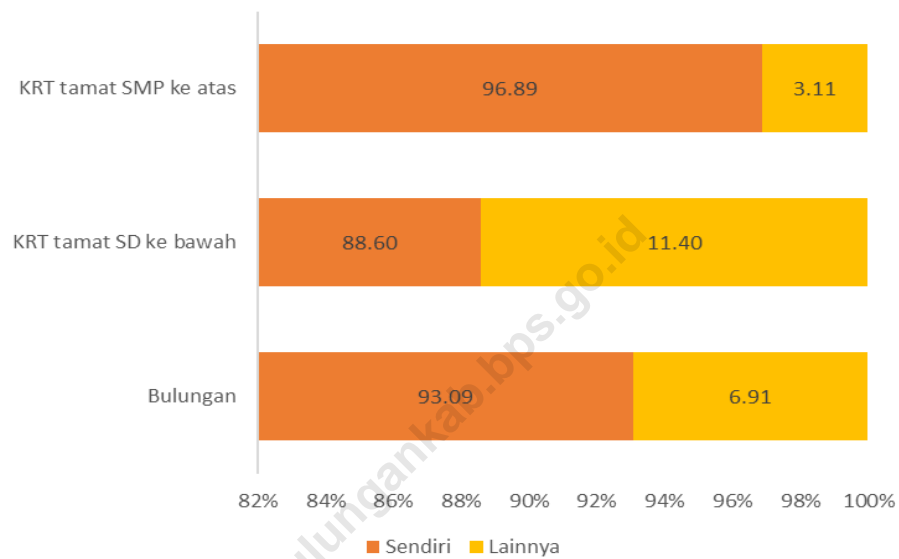


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Susenas 2020)

Dari gambar 7.1.1, terlihat bahwa mayoritas penduduk di wilayah Kabupaten Bulungan menghuni rumah milik sendiri, sementara masih terdapat sekitar 19,11 persen penduduk Kabupaten Bulungan masih tinggal di bangunan bukan milik sendiri. Apabila diklasifikasikan berdasarkan ijazah tertinggi dari kepala rumah tangga, diketahui bahwa terdapat sekitar 79,36 persen kepala rumah tangga dengan ijazah tertinggi

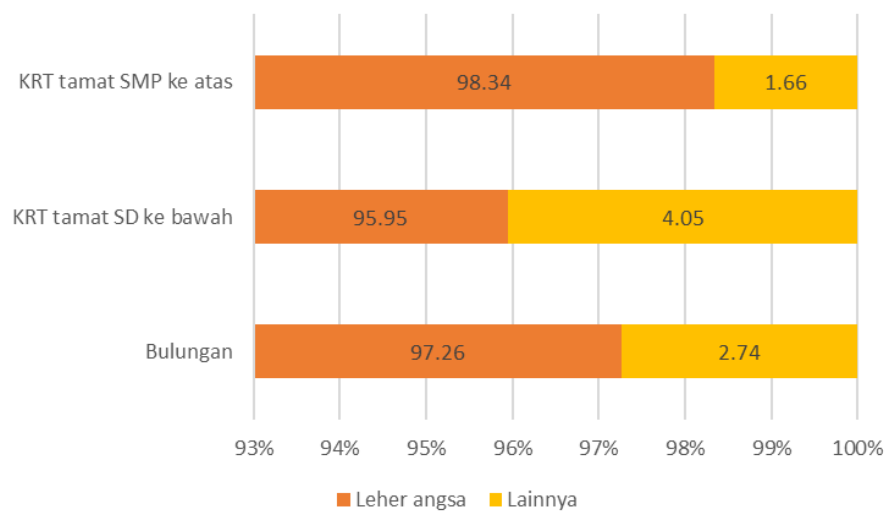
SMP ke atas yang tinggal di bangunan milik sendiri. Sementara itu terdapat sekitar 82,69 persen kepala rumah tangga tamatan SD ke bawah yang tinggal di bangunan milik sendiri.

Gambar 7.1.2
Persentase rumah tangga menurut karakteristik KRT dan fasilitas tempat buang air besar (persen), 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Susenas 2020)

Gambar 7.1.3
Persentase rumah tangga menurut karakteristik KRT dan jenis kloset yang digunakan, 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Susenas 2020)

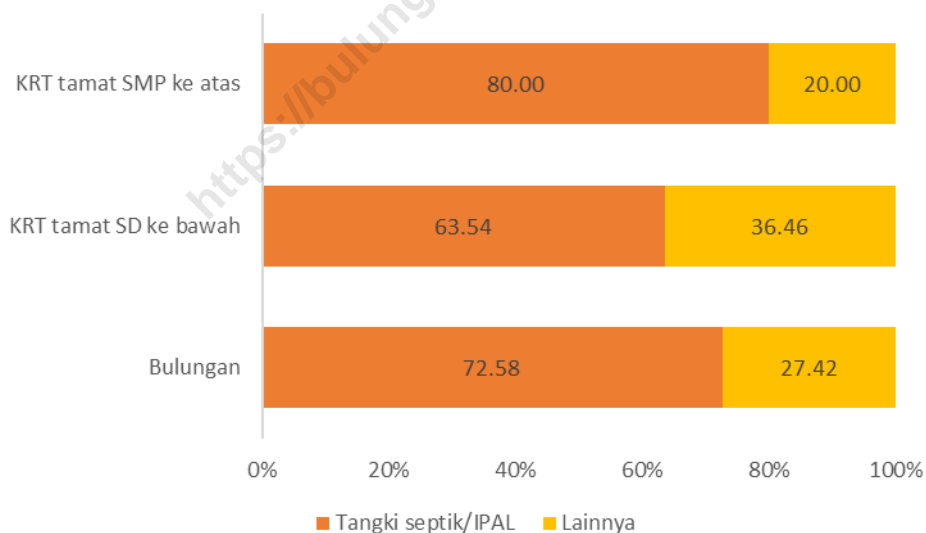
Bila dilihat dari fasilitas buang air besar berdasarkan karakteristik Pendidikan terakhir kepala rumah tangga (KRT) pada Gambar 7.1.2, KRT lulusan SMP ke atas cenderung lebih banyak yang menggunakan fasilitas buang air besar sendiri, yaitu sekitar 96,89 persen di kategori tersebut. Sedangkan pada kategori KRT lulusan SD ke bawah memiliki proporsi lebih sedikit yaitu sebesar 88,60 persen yang menggunakan fasilitas buang air besar sendiri pada kategori tersebut. Secara umum, di Kabupaten Bulungan, terdapat 93,09 persen rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar sendiri dibandingkan yang masih menggunakan jenis fasilitas lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa mayoritas penduduk Bulungan sudah memiliki kesadaran mengenai pentingnya menyediakan fasilitas buang air besar sendiri di tempat tinggal.

Kemudian, berdasarkan Gambar 7.1.3, terlihat bahwa mayoritas rumah tangga, yaitu sekitar 97,26 persen, di Kabupaten Bulungan telah menggunakan kloset leher angsa. Kloset leher angsa adalah jenis kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar. Dengan menggunakan jenis kloset ini, maka sanitasi pembuangan tinja di tempat tinggal penduduk menjadi lebih baik. Berdasarkan Gambar 7.1.3 dapat diketahui persentase KRT pada kategori yang telah menamatkan Pendidikan SMP ke atas lebih banyak yang menggunakan jenis kloset leher angsa daripada jenis kloset lainnya yaitu sekitar 98,34 persen. Sedangkan pada kategori KRT yang telah menamatkan Pendidikan SD ke bawah, hanya terdapat 97,26 persen yang menggunakan kloset leher angsa.

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi

dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Tempat pembuangan akhir tinja yang dipandang paling sehat dan aman terhadap lingkungan adalah dengan tangki septik/IPAL. Berdasarkan Gambar 7.1.4 diketahui bahwa hanya terdapat sekitar 72,58 persen rumah tangga di Kabupaten Bulungan yang telah menggunakan tangki septik/IPAL, sedangkan 36,46 persen rumah tangga masih menggunakan jenis pembuangan akhir tinja lainnya seperti kolam, sungai, laut, lubang tanah, dll. Oleh karena itu, diketahui bahwa masih perlu ditingkatkan program dan sosialisasi agar masyarakat menggunakan tangka septik/IPAL sebagai pembuangan akhir tinja.

Gambar 7.1.4
Persentase rumah tangga menurut karakteristik dan tempat pembuangan akhir tinja, 2020

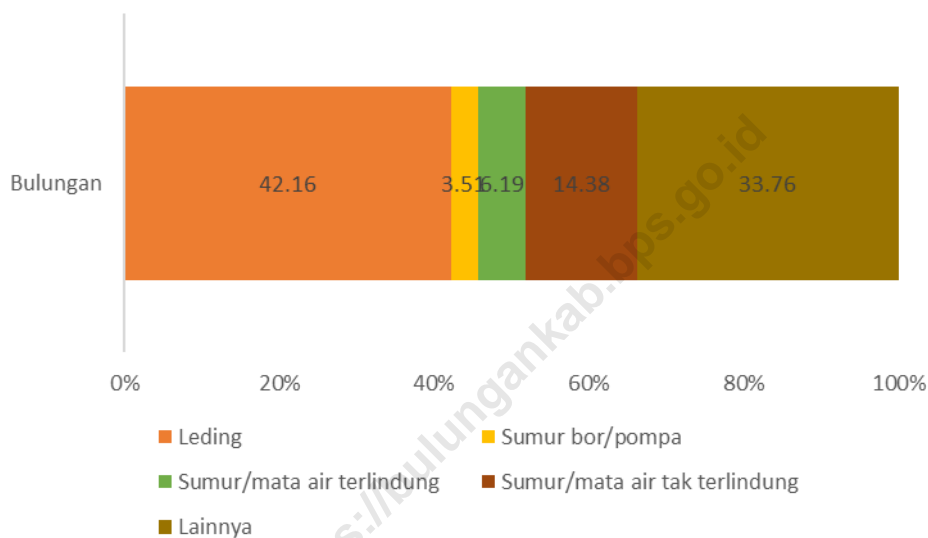


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Susenas 2020)

7.2 Fasilitas Rumah Tinggal

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah tinggal akan menentukan nyaman atau tidaknya rumah tersebut. Salah satu yang menjadi fasilitas rumah tinggal adalah ketersediaan air untuk digunakan mandi, cuci, dan kebutuhan lainnya.

Gambar 7.2.1
Persentase rumah tangga menurut sumber air utama untuk mandi/cuci/dll, 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan (Hasil Susenas 2020)

Berdasarkan Gambar 7.1.5, hampir setengah rumah tangga di Kabupaten Bulungan menggunakan sumber air utama untuk mandi/cuci/dll. Terdapat sekitar 42,16 persen rumah tangga menggunakan ledeng sebagai sumber air, kemudian 14,39 persen menggunakan sumur/mata air tak terlindung, 6,19 persen menggunakan sumur/mata air terlindung, 3,51 persen menggunakan sumur bor/pompa, dan sekitar 33,76 persen yang menggunakan sumber air lainnya. Hal ini menggambarkan mayoritas rumah tangga di Kabupaten Bulungan belum menjadikan air ledeng sebagai sumber air utama.

Berdasarkan data Perusahaan Daerah Air Minum Danum Benuanta Tanjung Selor, terdapat sekitar 14.300 jumlah pelanggan air yang terdaftar di seluruh Kabupaten Bulungan. Dimana air leding sudah dapat menjangkau beberapa kecamatan di Kabupaten Bulungan. Kecamatan yang dimaksud adalah Tanjung Palas, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sekatak dan Pulau Bunyu.

<https://bulungankab.bps.go.id>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BULUNGAN
BPS-Statistics of Bulungan Regency**

Jl. Kol. H. Soetadji 85 Tanjung Selor 77212
Tlp. (0552) 21171 Fax (0552) 22441
Email: bps6502@bps.go.id
Website: bulungankab.bps.go.id